

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAKALAR
(Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)**

SKRIPSI



NURLIAH

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2016

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAKALAR**

**(Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar***

**NURLIAH
1261542017**

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor 0589/UN36.6/DL/2016 tanggal 29 Januari 2016 untuk membimbing saudara:

Nama : Nurliah
Nim : 1261542017
Jurusan : PPKn/S1
Fakultas : Ilmu Sosial
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TAKALAR (Studi Tentang
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)**

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa, diteliti dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi strata I (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada hari Jumat 01 April 2016 dan dinyatakan lulus.

Makassar, 16 April 2016

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum

NIP: 19671231 199303 1 016

Pembimbing II

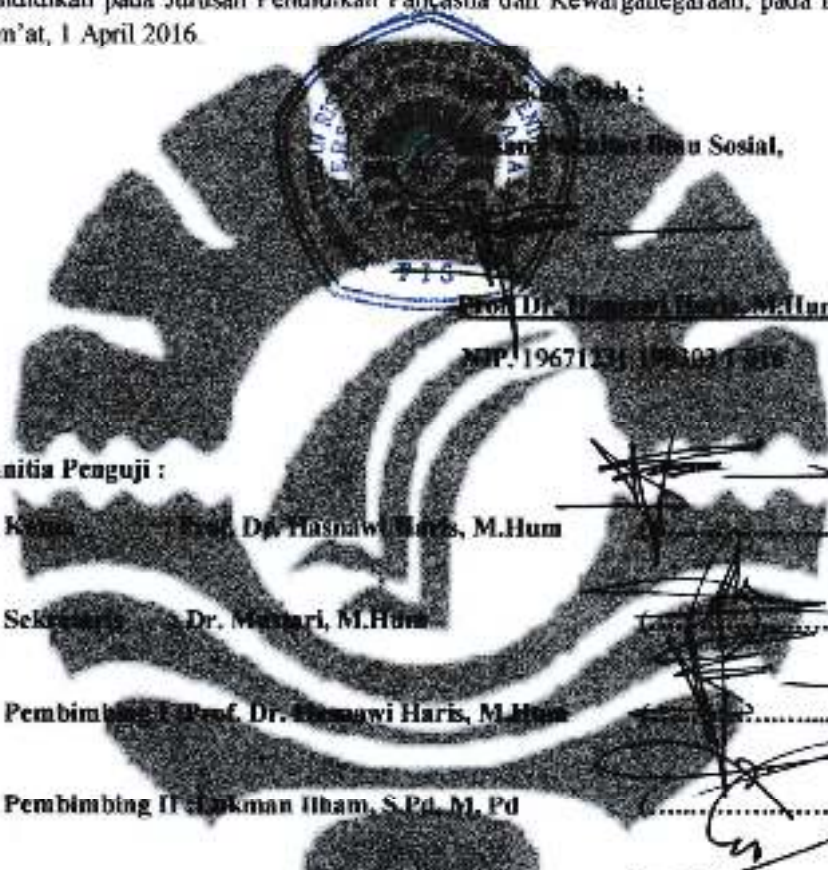


Lukman Ilham, S. Pd, M. Pd

NIP: 19760703 200701 1 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 1687/UN36.6/KM/2016 pada tanggal 28 Maret 2016 untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pada hari Jum'at, 1 April 2016.


Diterima Oleh :
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Makassar
Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Penguji :
1. Ketua : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum
2. Sekretaris : Dr. Muntari, M.Hum
3. Pembimbing I : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum
4. Pembimbing II : Lukman Ilham, S.Pd, M. Pd
5. Penguji I : Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H, M.H
6. Penguji II : Dr. Muhammad Akbal, M. Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama : Nurliah
Nim : 1261542017
Tempat/Tgl Lahir : Tanahbata, 26 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : PPKn
Program Studi : S1
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR (Studi Tentang Alokasi Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)

Dengan dosen pembimbing masing-masing

1. Prof. Dr. Lutfanwi Haris, M. Hum
2. Lukman Ilham, S. Pd, M. Pd

Demikianlah hasil karya sendiri, bebas dan jujur dipaparkan. Pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia di hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagai bukti.

Makassar, 10 April 2016

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan PPKn

Dr. Mustari, M.Hum
NIP. 19651231 199003 1015

Yang Membuat Pernyataan

Nurliah
Nim: 1261542017

MOTTO

Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu

Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu

Adalah sikapmu sendiri

(Nurliah)

**“Kupersembahkan karya terbaikku ini
untuk kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Saudaraku, dan kepada semua Sahabat-Sahabatku
Atas segala doa, dukungan dan bantuannya”**

ABSTRAK

Nurliah, 2016. SKRIPSI. *Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)*. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melindungi lahan pertanian produktif, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar yang berjumlah 43 orang, dan sampel sebanyak 7 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring, 2) Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) masih terdapat ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya, dan 3) Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) penguatan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Tuhan Yang Maha Esa*, atas segala rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar (Studi tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Meski demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk diberikan kritikan maupun masukan.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari begitu banyak kesulitan, baik dalam proses pengumpulan bahan pustaka maupun dalam penyusunannya. Namun, karena begitu banyak doa, motivasi, dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini berlangsung, sehingga segala hambatan yang ada dapat dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Prof. Dr.Arismunandar, M.Pd** selaku Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan peluang untuk mengikuti proses perkuliahan pada Jurusan PPKn.

2. **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar beserta staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar atas semua bantuannya selama penulis menempuh studi di Universitas Negeri Makassar.
3. **Dr. Mustari, M.Hum** selaku Ketua Jurusan PPKn dan **Lukman Ilham, S. Pd, M.Pd** selaku sekretaris Jurusan PPKn atas pelayanan yang diberikan selama ini.
4. **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum** selaku pembimbing I dan **Lukman Ilham, S. Pd, M. Pd** selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan baik, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H, M.H** selaku penguji I dan **Drs. Muhammad Akbal, M. Hum** selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberi masukan, koreksi serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial beserta Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial untuk menorehkan tinta emas di almamater orange yang tercinta.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda **Mustafa** dan Ibunda **Cawang**, serta adindaku tercinta **Wahyuni Riana** yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat baik itu dalam

bentuk moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. **Drs. H. Muh. Ridwan Nur, M. Si** selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar beserta staf Pegawai yang telah memberikan keterangan serta memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi.
9. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis, untuk memberikan informasi dan data-data dalam penyusunan skripsi.
10. Semua keluargaku tanpa terkecuali, terimakasih atas segala bantuannya, suportnya, dan dukungan doanya selama penulis dalam bangku kuliah.
11. Untuk sahabat-sahabatku tercinta (**Perawati, Indrawati Syamsuddin, Nurkumalasari, Sri Hariyati, Beccettang**), serta seluruh teman-teman PPKn angkatan 2012 terkhusus kelas B terima kasih untuk semua bantuan, semangat dan motivasinya selama ini.
12. Untuk sahabat- sahabatku dari SMA, **Salamawati, Irma Erviana, Nurfahniati, Sahreni, Rahmawati, Hariati dan Nurdianaterima** kasih atas segala semangat, dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman KKNku, **Rezky Amaliah Kasba, Khusnul Wahida, Amaliah Astuti, Nur Alviani Asrul, Ramdaniah, Satriani, Rommy Crisnal P, Piet Endarwanto, Muh Karno, Muh Ridwan dan Muh Naser**, terima kasih atas semangat dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi salah satu bahan informasi pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Makassar, 24 Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
A. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Implementasi	7
2. Peraturan Daerah	9
3. Alih Fungsi Lahan.....	13
4. Pertanian	19

5. Perumahan	20
6. Badan usaha dan Jasa	26
B. KERANGKA PIKIR	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Variabel dan Desain Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel	28
C. Populasi dan Sampel	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Peran BAPPEDA dalam Melindungi Lahan Pertanian Produktif Agar Tidak Beralih Fungsi	41
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian	44
3. Upaya Pemerintah dalam Mengoptimalisasikan Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Takalar dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian	53
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
		an
Tabel4.1	Luas lahan pertanian tiap kecamatan di Kabupaten Takalar tahun 2015.	31
Tabel4.2	Luas bangunan Bappeda Kabupaten Takalar	32
Tabel 4.3	Latar belakang Pendidikan Pegawai Bappeda Takalar Tahun 2015	34
Tabel 4.4	Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten Takalar Tahun 2015	34
Tabel 4.5	Data Pejabat Eselon Lingkup BAPPEDA Tahun 2015	35
Tabel 4.6	Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana dalam lingkup Bappeda Kabupaten Takalar Tahun 2015.	37

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	SkemaKerangkaPikir	27
2	Sruktur Organisasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keterangan Penelitian
 1. Surat Usulan Judul Skripsi
 2. Surat Rekomendasi Tim Pengarah Gagasan Awal Penulisan Skripsi
 3. Surat Persetujuan Judul Dan Calon Pembimbing
 4. Surat Persetujuan Ujian Proposal
 5. Surat Tanda Terima Naskah Dan Persetujuan Seminar Proposal
 6. Surat Undangan Seminar Proposal
 7. Surat Pengesahan Jilid Proposal Dan Melaksanakan Penelitian
 8. Surat Pengesahan Judul Skripsi Dan Pembimbing
 9. Surat Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian
 10. Surat Permintaan Izin Penelitian Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 11. Surat Permintaan Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Suku, Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar
 12. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Pedoman Wawancara
- Dokumentasi Penelitian
- Daftar Informan
- Riwayat Hidup Penulis
- Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berorientasi pada manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Upaya tersebut dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar yang salah satunya yaitu kebutuhan tentang perumahan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin besar tentunya menuntut ketersediaan perumahan yang semakin banyak, terutama banyak terjadi di kota-kota besar. Namun jumlah lahan yang terbatas akan memicu harga lahan dan perumahan menjadi semakin mahal.

Sebagai dampaknya, Kabupaten yang memiliki lokasi paling dekat dengan kota akan menjadi alternatif lokasi penyediaan perumahan. Ketersediaan lahan dan harga lahan yang masih rendah menjadi untungan dalam mengembangkan kawasan perumahan di wilayah sekitar kota. Keuntungan tersebut menjadi pendorong bagi pengembang perumahan (developer) untuk memperluas area pembangunannya sehingga memunculkan fenomena alih fungsi lahan. Namun yang

kemudian menjadi satu masalah adalah bahwa alih fungsi lahan yang terjadi telah merambah pada area pertanian yang masih produktif.

Dalam hal ini, kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang dan alih fungsi lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam upaya penataan serta pengaturan kecenderungan penggunaan lahan. Lebih dari itu diharapkan mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dalam suatu wilayah guna menjaga keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Takalar, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi-Selatan yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat setiap tahunnya dengan kepadatan penduduk mencapai 501 jiwa/km². Peningkatan penduduk salah satunya akibat urbanisasi sebagai dampak dari perluasan kawasan kota Makassar. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perumahan, di sisi lain masuknya para pengembang perumahan (developer) membuat kegiatan alih fungsi lahan di Kabupaten Takalar terus meningkat.

Berdasarkan hasil observasi, Lahan pertanian di Kecamatan Pattallassang dan Polong Bangkeng Utara pada periode tahun 1996 hingga 2010 mengalami penyusutan lahan pertanian dari 24.219,09 ha atau 95% dari total luas area pada tahun 1996 menjadi 20.758,41ha atau

82% dari total luas areapada tahun 2010.¹ Sedangkan penggunaan lahan terbanyak berturut-turut di Kecamatan Galesong tahun 2014 adalah persawahan, pemukiman, tambak dan semak. Perubahan penggunaan lahan berupa persawahan di Kecamatan Galesong berkurang dari 1963,35 dengan persentase sebesar 89,35 % menjadi 1627,79 dengan persentase 74,10 %. Lahan persawahan ini beralih fungsi menjadi permukiman 345,41 Ha, tambak 2,38 Ha, jadi lahan persawahan seluas 335.56 Ha telah berubah fungsi menjadi lahan permukiman dan tambak.²

Dari luas lahan pertanian yang ada saat ini, sebagian telah dibebaskan untuk kawasan perumahan dan sudah mulai digarap oleh pihak pengembang. Bisnis perumahan di Takalar memang berkembang dengan pesat akhir-akhir ini, bahkan sudah merambah ke area pinggiran Takalar. Untuk mengantisipasi tergerusnya area pertanian maka alih fungsi lahan telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) No. 6 Tahun 2012, dengan harapan pihak pengembang (developer) dapat memperhatikan acuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tersebut dalam memilih lahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “ **Implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang**

¹ Arsyad,syamsyahrir.2012.*perubahan lahan pertanian di Kabupaten Takalar tahun 1996 dan 2010 menggunakan citra satelit landsat 5 TM*.Makassar:Fakultas pertanian Universitas Hasanuddin (hal 57)

² Salim,agus.2015. *perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dari tahun 2000-2014*.Makassar:Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar (hal 79)

Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi di Kabupaten Takalar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar.

3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terhadap perlunya penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan karya tulis yang dibahas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Lembaga perguruan tinggi (Universitas Negeri Makassar)
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan dijadikan sebagai salah satu acuan bagi penulis karya ilmiah yang sesuai atau relevan dengan judul tersebut.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berfungsi sebagai bahan masukan dalam rangka menegakkan Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031.
3. Bagi masyarakat
Penelitian ini sebagai referensi untuk mengetahui tentang pentingnya lahan pertanian bagi kelangsungan hidup.

4. Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan atau wawasan bagi penulis mengenai penegakan Perda No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoprasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki”.³

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁴

³ Solichin, Nugroho hal 133

⁴ Ripley dan Franklin, Winarno hal 148

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakn bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.⁵

Chieft J.O. Udoji mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.⁶

Menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada penciptaan tujuan dan sasara yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *drivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.⁷

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa proses implementasi berjalan secara linier dari kebijakan publik ke implementor dan kinerja kebijakan publik.

Dalam model tersebut, proses implementasi kebijakan dipengaruhi

⁵ Grindle, Winarno hal 149

⁶ Udoji, Wahab hal 15

⁷ Van meter dan van horn, Agustino hal139

oleh variabel yaitu aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta kecenderungan pelaksana/implementor.⁸

Berdasarkan dengan variabel tersebut, maka faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dalam model Van Meter dan Van Horn adalah:

- a. Standar dan sasaran kebijakan.
- b. Sumberdaya.
- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksana.
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.
- f. Disposisi implementor.⁹

2. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh

⁸ Van meter dan Van horn, Nugroho hal 681-699

⁹ Van meter dan van horn, Subarsono hal 99-101

Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.¹⁰

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak

¹⁰ Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005)hal 131-132

masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.¹¹

Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi yang muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

¹¹ Abdullah, Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005)hal 133

- a. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
- b. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
- c. Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tigapuluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mengantisipasi tergerusnya area pertanian maka alih fungsi lahan telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) No. 6 Tahun 2012, dengan harapan pihak pengembang (developer) dapat memperhatikan acuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tersebut dalam memilih lahan.

3. Alih fungsi lahan

Istilah penggunaan lahan (*land use*), berbeda dengan istilah penutup lahan (*land cover*).Perbedaannya, istilah penggunaan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, sedangkan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada lahan tertentu.Kedua istilah ini seringkali digunakan secara rancu.¹²

Beberapa pengertian mengenai penggunaan lahan pada dasarnya sama, yakni mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan adalah suatu bentuk alternatif kegiatan usaha pemanfaatan lahan seperti pertanian, perkebunan ataupun pemukiman. Penggunaan lahan merupakan interaksi antara manusia dan lingkungannya, dimana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas diatas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan.

Penggunaan lahan bukan saja permukaan bumi yang berupa darat namun juga berupa perairan laut. Disamping unsur-unsur alami seperti tanah, air, iklim, dan vegetasi: aktivitas manusia sangat penting dikaji dari aspek kehidupannya baik secara individu, kelompok atau

¹² <http://punyauchti.blogspot.co.id/2003/05/tata-guna-lahan-land-use.html?m=1> di akses pada tgl 3 jan 2016 pukul 19.00

masyarakat. Oleh karena itu, kajian penggunaan lahan perlu memerhatikan pengambilan keputusan seseorang terhadap pilihan terbaik dalam menggunakan lahan untuk tujuan tertentu.¹³

Menurut Malingreau, penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Bahkan, disamping sebagai faktor penting dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan.¹⁴

Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematis dan non-sistematis. Perubahan sistematis terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan peta multiwaktu. Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-sistematis terjadi karena kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, berkurang,

¹³ <http://punyauchi.blogspot.co.id/2003/05/tata-guna-lahan-land-use.html?m=1> di akses pada tgl 3 jan 2016 pukul 19.25

¹⁴ Malingreau, Ritohardoyo. penggunaan dan tata guna lahan. (Fakultas geografi UGM:Yogyakarta,2002)hal 9

ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun lokasinya.

Penggunaan lahan yang mengakibatkan degradasi tanah, erosi, penurunan kesuburan tanah, penggaraman tanah, dan sebagainya; dapat disebut penggunaan berlebihan (*over use*), jika dianggap bahwa penggunaan sumber daya lahan yang secara umum ditinjau dari tujuan utama untuk memperbaiki atau mempertahankan faktor-faktor produksi atau mempertahankan dan memperbaiki keseimbangan ekologi suatu wilayah.

Menurut Lestari, alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.¹⁵

Pesatnya pembangunan dan penambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya alih guna lahan sawah secara cepat. Dari berbagai bentuk penggunaan lahan pertanian, lahan sawah merupakan penggunaan lahan yang banyak mengalami alih guna. Pada umumnya

¹⁵ Mustofa. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di kabupaten demak (fakultas ekonomi universitas diponegoro semarang, 2011) di akses <http://www.academia.edu>

alih guna lahan sawah bersifat tidak dapat balik (*irreversible*) dan dapat membawa kemerosotan terhadap kualitas lingkungan.

Penggunaan lahan dewasa ini semakin parah dengan adanya kasus-kasus seperti suatu lahan yang rencana akan digunakan untuk pengembangan kota saat diimplementasikan sering kali telah digunakan untuk jenis penggunaan lahan yang lain. Perubahan guna lahan mudah saja terjadi yang kemudian disahkan pada evaluasi rencana berikutnya. Keadaan ini tentu tidak benar, bahkan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat karena perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah diketahui masyarakat. Perubahan juga mempunyai dampak yang besar terhadap pengeluaran publik, terutama jika perubahan itu untuk guna lahan yang lebih komersial seperti pusat perbelanjaan, pertokoan, dan lain sebagainya.¹⁶

Para ahli berpendapat bahwa perubahan tata guna lahan lebih disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Menurut McNeill, faktor-faktor yang mendorong perubahan tata guna lahan adalah politik, ekonomi, demografi dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola perubahan tata guna lahan. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan tata guna lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup,

¹⁶ Mustofa. analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di kabupaten demak (fakultas ekonomi universitas diponegoro semarang, 2011) di akses <http://www.academia.edu>

transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan. Teknologi juga berperan dalam menggeser fungsi lahan.¹⁷

Grubler mengatakan ada tiga hal bagaimana teknologi mempengaruhi pola tata guna lahan. Pertama, perubahan teknologi telah membawa perubahan dalam bidang pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian dan produktivitas tenaga kerja. Kedua, Perubahan teknologi transportasi meningkatkan efisiensi tenaga kerja, memberikan peluang dalam meningkatkan urbanisasi daerah perkotaan. Ketiga, teknologi transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas pada suatu daerah.¹⁸

Perubahan tata guna lahan di suatu wilayah merupakan pencerminan upaya manusia memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan. Perubahan tersebut akan berdampak terhadap manusia dan kondisi lingkungannya. Menurut Suratmo dampak suatu kegiatan pembangunan dibagi menjadi dampak fisik-kimia seperti dampak terhadap tanah, iklim mikro, pencemaran, flora dan fauna, dampak terhadap kesehatan lingkungan dan dampak terhadap sosial ekonomi yang meliputi ciri pemukiman, pola lapangan kerja dan pola pemanfaatan sumberdaya alam yang ada.

Lestari mendefinisikan alihfungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahanfungsi sebagian atau seluruh

¹⁷ Neill,ritohardoyo hal 11

¹⁸ Gubler,ritohardoyo hal 11

kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Pesatnya pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya alih guna lahan sawah secara cepat. Dari berbagai bentuk penggunaan lahan pertanian, lahan sawah merupakan penggunaan lahan yang banyak mengalami alih guna. Pada umumnya alih guna lahan sawah bersifat tidak dapat balik (*irreversible*) dan dapat membawa kemerosotan terhadap kualitas lingkungan.¹⁹

Istilah penggunaan lahan (*land use*), berbeda dengan istilah penutup lahan (*land cover*). Perbedaannya, istilah penggunaan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, sedangkan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada lahan tertentu. Kedua istilah ini seringkali digunakan secara rancu.

¹⁹ <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tata-guna-lahan/> di akses pada tgl 3 jan 2016 pukul 19.35 wita

Beberapa pengertian mengenai penggunaan lahan pada dasarnya sama, yakni mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan adalah suatu bentuk alternatif kegiatan usaha pemanfaatan lahan seperti pertanian, perkebunan ataupun pemukiman. Penggunaan lahan merupakan interaksi antara manusia dan lingkungannya, dimana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas diatas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan.

Penggunaan lahan bukan saja permukaan bumi yang berupa darat namun juga berupa perairan laut. Disamping unsur-unsur alami seperti tanah, air, iklim, dan vegetasi, aktivitas manusia sangat penting dikaji dari aspek kehidupannya baik secara individu, kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, kajian penggunaan lahan perlu memerhatikan pengambilan keputusan seseorang terhadap pilihan terbaik dalam menggunakan lahan untuk tujuan tertentu.²⁰

4. Pengertian pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan , bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang

²⁰ <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tata-guna-lahan/> di akses pada tgl 3 jan 2016 pukul 19.40 wita

melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

A.T Mosher mengartikan pertanian adalah suatu bentuk produksi khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.²¹

5. Perumahan

Dalam UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.²²

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi Tujuan pembangunan perumahan menurut pendapat Muchin agar setiap

²¹ Mosher, A.T. Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Syarat-syarat mutlak pembangunan dan modernisasi (Jakarta: Yasaguna. 1968) hal 19

²² UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

orang dapat menempati perumahan yang sehat untuk mendukung kelangsungan dan kesejahteraan sosialnya.²³

Perumahan (*housing*) adalah tempat dengan fungsi dominan untuk tempat tinggal. Untuk pengertian lebih lanjut, perumahan dapat diartikan dari beberapa elemen dari perumahan, yaitu:

- d. *Shelter*, yaitu perlindungan terhadap gangguan eksternal (alam, binatang) dan sebagainya.
- e. *House*, yaitu struktur bangunan untuk bertempat tinggal.
- f. *Housing*, yaitu perumahan, hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bertempat tinggal (membangun, menghuni).
- g. *Human settlement*, yaitu kumpulan (agregat) rumah dan kegiatan perumahan (pemukiman).
- h. *Habitat*, yaitu lingkungan kehidupan (tidak sebatas lingkungan).

Menurut Doxiadis, pemukiman akan berjalan dengan baik jika terkait beberapa hal yaitu alam, manusia, kehidupan sosial, ruang dan hubungan. Rumah adalah keperluan yang perlu ada tujuan bertujuan untuk dijadikan sebagai tempat berlindung dan merupakan keperluan peringkat ke dua yang mesti dicapai untuk tujuan keselamatan sebelum keperluan-keperluan dalam peringkat yang lebih tinggi dipenuhi, rumah sebagai keperluan diri dan keluarga.²⁴

²³ Muchsin, sujarto hal 55

²⁴ <http://amankeun.blogspot.co.id/makalah-pembangunan> diakses tgl 4 jan 2016 pukul 19.00 wita

Perumahan bukan hanya merupakan tempat berlindung bagi masyarakat, tetapi perumahan merupakan salah satu faktor penentu perkembangan masyarakat yang menempatnya. Perumahan sebagai pemenuhan fungsi badan sosial sering kali terbentur dengan masalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, perlengkapan fasilitas kesehatan, perbedaan kebudayaan antar masyarakat, serta penyediaan tempat rekreasi bagi para penghuninya yang ada akhirnya akan menjadi salah satu faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat perumahan yang disebutkan dalam undang-undang. Permasalahan lain yang dadilihat secara langsung dalam dinamika kehidupan masyarakat perumahan adalah penyediaan rumah, sarana dan prasarana perumahan itu sendiri.

Kebutuhan perumahan bagi penduduk perkotaan di Indonesia saat ini pda umumnya dilaksanakan secara informal yang mencapai 85% dari total pembangunan rumah, sisanya sebesar 15% dilaksanakan secara formal oleh pemerintah melalui perum perumnas, swasta terutama melalui persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) dan koperasi. Sehingga dapat diaktakan bahwa pelaku pembangunan perumahan terdiri dari swasta yang diwakili oleh para pengembang anggota REI, pemerintah diwakili oleh perumnas dan masyarakat yang diwakili oleh koperasi.

Mengacu pada pendapat bahwa perumahan sesungguhnya berkaitan erat dengan indusrialisasi, aktifitas ekonomi dan

pembangunan, perumahan terjadi perkembangan aktifitas ekonomi yang akan berdampak terhadap pembangunan perumahan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari tahun ketahun khususnya dalam bidang perdagangan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan perumahan. Kemajuan kesejahteraan kemudahan alat transportasi dan kemajuan sarana pendidikan serta interaksi yang terjadi antar masyarakat, baik sesama masyarakat perumahan maupun masyarakat sekitar perumahan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat perumahan dan masyarakat sekitar dan akhirnya menimbulkan suatu perubahan sosial dan ekonomi.

Pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan harkat serta martabat masyarakat. Disamping kontribusinya dalam usaha menaggulangi masalah penyebaran penduduk, perkembangan yang terjadi dalam lingkungan perumahan yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat mengakibatkan munculnya permasalahan, baik masalah internal maupun masalah eksternal yaitu dampak dari perumahan bagi masyarakat d luar perumahan dan lingkungan alam sekitarnya.

Permasalahan yang timbul dalam lingkungan perumahan mencakup beberapa bidang kehidupan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, seperti kesenjangan sosial yang menonjol dalam kalangan masyarakat perumahan yang berimbas terhadap kurang terintegrasinya masyarakat perumahan, penggunaan lahan yang tidak

semestinya yang dapat mengurangi keindahan dan tata guna lahan serta penggunaan unit tidak sesuai dengan fungsinya. Kerusakan jalan yang tergenang air jika musim hujan merupakan dampak dari adanya peningkatan jumlah penduduk perumahan.

Dengan adanya perumahan terdapat perubahan dampak negatif terhadap warga masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan perumahan, yaitu lahan pertanian yang secara perlahan-lahan terus berkurang, artinya bahwa dengan keberadaan perumahan tersebut dimana awalnya tanah yang menjadi kapling dari perumahan itu sendiri merupakan lahan pertanian dari warga setempat. Selain itu, polusi udara semakin meningkat karena lahan-lahan yang dulunya merupakan lahan penghijauan banyak ditanami pohon-pohon yang menghasilkan udara sejuk harus ditebangi hanya karena proyek perumahan. Indonesia seperti halnya bangsa-bangsa lain dihadapkan pada tantangan pengembangan yang berat di masa mendatang. Tantangan ini berpangkal pada kenyataan yang tak sulit diterka, yakni akan terus bertambahnya jumlah penduduk.

Kebutuhan tanah untuk pembangunan kota-kota memang sebagian besar dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk kebutuhan perumahan menjadi elemen utama kegiatan kota. Keadaan ini dapat ditunjukkan dengan data yang ada di BPN dari 13 kota, yaitu bahwa antara 60-80% perumahan. Perkembangan daerah perumahan akan terus berlanjut. Seiringan dengan itu, kebutuhan tanah bagi kegiatan

lainnya yang akan menjadi penunjangnya akan turut berkembang(perdagangan, ruang hijau,dan lain-lain), walaupun luasnya tidak sama dengan kebutuhan untuk perumahan. Berdasarkan pertimbangan itulah, masalah penyediaan tanah bagi berbagai kepentingan untuk pelaksanaan pembangunan perlu diarahkan sehingga tujuan usaha penataan ruang tercapai.

Pembangunan dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan apabila dalam prosedur penyediaan tanahnya dapat dilaksanakan dengan urutan prioritasnya sesuai dengan tingkat kepentingannya. Jika tidak ditetapkan prioritasnya, akan terjadi rebutan dalam pemilihan lokasi tiap kegiatan sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan penduduk dari waktu ke waktu harus selalu diantisipasi dengan perkembangan kebutuhan penunjangnya sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam mengantisipasinya, akan menyebabkan ketidakseimbangan antar kebutuhan dengan pelayanan. Hal ini akan mengakibatkan sasaran usaha penataan ruang yang mengarah pada yang kurang diharapkan. Maka perlu untuk selalu diupayakan adanya keserasian antara kebutuhan dan pelayanan bagi penduduk, serta perlu memantau tingkat/standar kebutuhan masyarakat yang selalu berubah sesuai dengan dinamika dari pembangunan. Dalam usaha penataan ruang, setiap perubahan yang mungkin terjadi

di luar dugaan sebelumnya harus dapat diantisipasi sehingga tata ruang yang direncanakan harus bersifat dinamis, sesuai dengan kondisi fisik, ekonomi dan sosial kultur masing-masing wilayah.

6. Badan Usaha dan Jasa

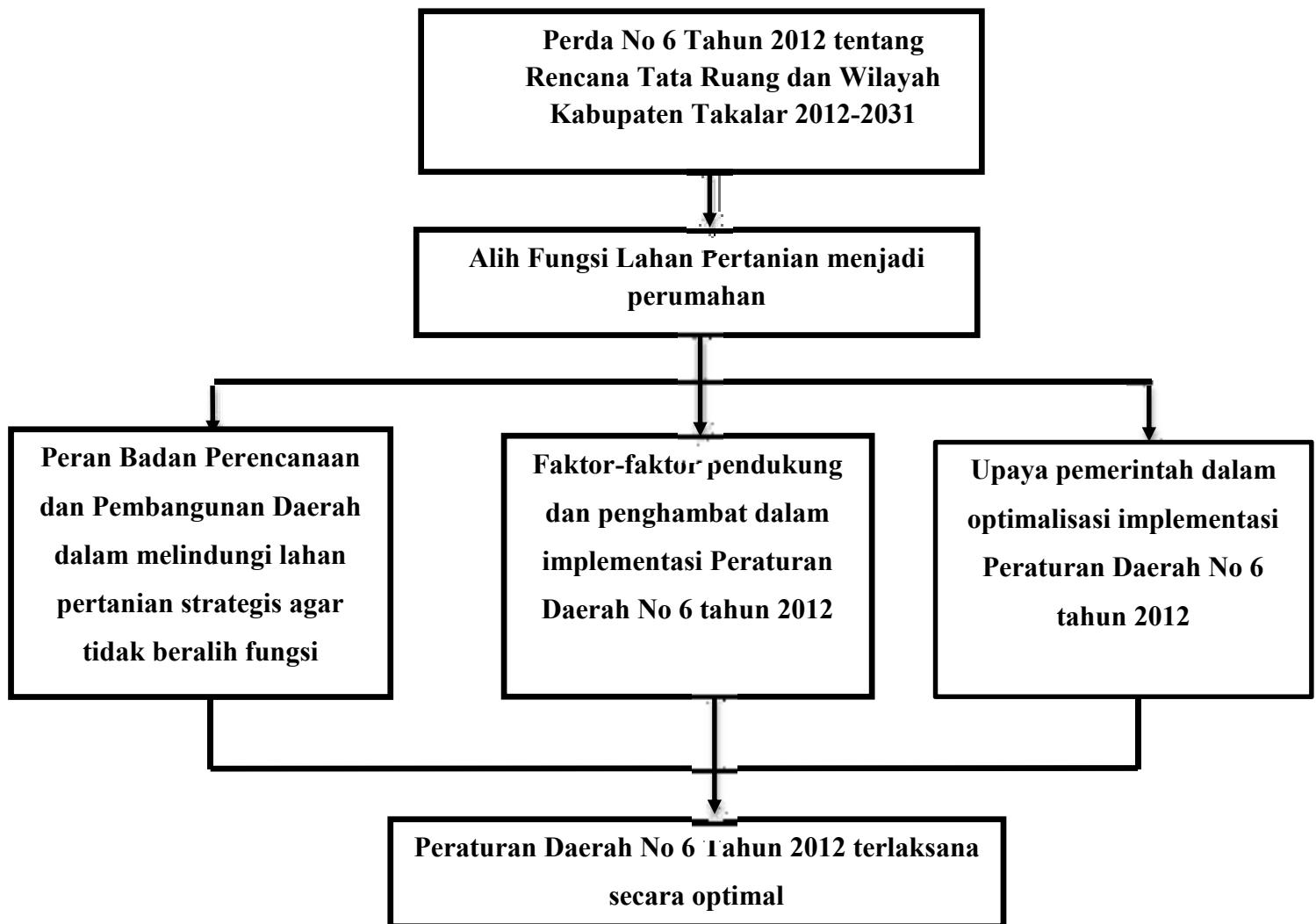
Badan usaha adalah kesatuan sistem yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor-faktor produksi.²⁵

Fungsi badan usaha adalah membudidayakan sumber daya dan dana dalam masyarakat ke arah pendayagunaannya bagi pemenuhan tujuan badan usaha itu sendiri. Secara umum, tujuan badan usaha menentukan berfungsinya sebuah badan usaha dalam masyarakat. Salah satu fungsi penting badan usaha adalah menciptakan kesempatan kerja bagi banyak anggota masyarakat untuk dapat mencurahkan kemampuan profesionalnya untuk memperoleh pendapatan dan sebagian digunakan untuk imbal jasa bagi mereka yang lebih berperan serta dalam badan usaha.

²⁵ <http://www.google.co.id/makalah> badan usaha di akses pada tanggal 3 januari 2016

B. Kerangka Berpikir

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.

SKEMA KERANGKA BERFIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang dikaji adalah ” Implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 terkait tentang alih fungsi lahan pertanian”.

2. Desain penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian mencakup “Implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2013 terkait tentang alih fungsi lahan pertanian” dengan mengumpulkan informasi detail melalui prosedur pengumpulan data.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya persepsi interpretasi yang berlainan antara penulis dan pembaca maka perlu merumuskan variabel penelitian ini secara operasional. Adapun definisi operasional variabel penelitian ini adalah :

- Implementasi adalah pelaksanaan peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkhusus tugas dan fungsi BAPPEDA dalam menangani alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar.

- Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Takalar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar berjumlah 43 orang.

2. Sampel

Teknik penentuan sampel menggunakan teknik pemilihan secara sengaja (*purposive sampling*), yakni sampel berjumlah 7 informan untuk mengetahui optimalisasi peraturan daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan. yakni pengamatan tentang implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 mengenai alih fungsi lahan pertanian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada responden yaitu

pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data-data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten takalar.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan apa adanya mengenai *Implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar terkait tentang Alih fungsi Lahan Pertanian*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan luas Kantor Bappeda Kabupaten Takalar

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar terletak di Jl. Syek Yusuf No. 2 Adapun batas- batas dari Kantor Bappeda adalah :

Sebelah utara	: Badan lingkungan hidup
Sebelah selatan	: Asrama Kodim
Sebelah barat	: Arsip perpustakaan daerah
Sebelah timur	: Apotik

Adapun luas lahan pertanian tiap kecamatan di Kabupaten Takalar yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.1 Luas lahan pertanian tiap kecamatan di Kabupaten Takalar tahun 2015.

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Mangarabombang	2899
2.	Mappakasunggu	245
3.	Sanrobone	881
4.	Polombangkeng Selatan	3931

5.	Pattallasang	1298
6.	Polombangkeng Utara	3689
7.	Galesong Selatan	1049
8.	Galesong	1474
9.	Galesong Utara	796
	Jumlah	16.262

Sumber : BPS,Takalar dalam angka 2015

Tabel 4.2. Luas bangunan Bappeda Kabupaten Takalar.

No	Bangunan	Luas
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.938 m2
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	60 m2
	Total	3.998 m2

Sumber: Kantor Bappeda Kabupaten Takalar.

2. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Takalar

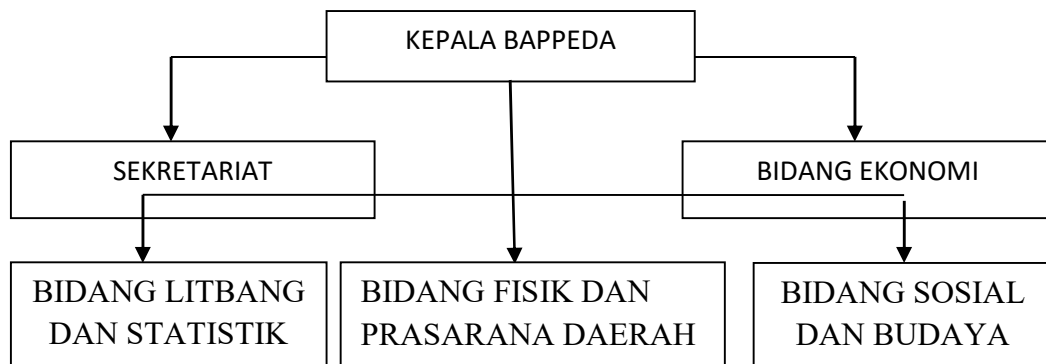
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA, adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Kabupaten Takalar

berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2008 memiliki tugas pokok melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi BAPPEDA adalah :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan.
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala BAPPEDA dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 4.1. Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Takalar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Takalar berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 43 orang Pegawai Negeri Sipil, jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil di lingkup BAPPEDA Kabupaten Takalar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Latar belakang Pendidikan Pegawai Bappeda Takalar Tahun 2015

NO.	PEGAWAI	JENIS PENDIDIKAN							JUMLAH
		SLTP	SLTA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	PEGAWAI LAKI – LAKI	0	7	0	0	10	8		25
2	PEGAWAI WANITA	0	5	0	1	6	6		18
JUMLAH			12		1	16	14		43

Sumber : Kantor BAPPEDA Kabupaten Takalar.

Tabel 4.4 Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten Takalar Tahun 2015

No. Urut	Pangkat dan Golongan	Jumlah Pegawai	Ket
1	Pembina Tk.I, IV/c	1	
2	Pembina Tk.I, IV/b	3	
3	Pembina, IV/a	4	
4	Penata Tk.1, III/d	6	
5	Penata, III/c	6	
6	Penata Muda Tk.1, III/b	9	
7	Penata Muda, III/a	6	
8	Pengatur Tk. I, II/d	1	
9	Pengatur, II/c	3	
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	5	
	Jumlah	43	

Sumber : Kantor BAPPEDA Kabupaten Takalar.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa secara umum Sumber Daya manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar cukup memadai. Hal ini terutama di tunjukkan dari tingkat pendidikan formal S2 sebanyak 14 Orang, 16 orang berpendidikan S1. Sedangkan Dilihat dari golongan dan kepangkatan terlihat sudah cukup proporsional dimana aparat dinominasi oleh golongan III sebanyak 27 orang, sementara golongan IV sebanyak 8 orang dan golongan II sebanyak 9 orang. Sebagai aparat golongan II melaksanakan tugas-tugas operasional dan mereka dibantu oleh tenaga honorer dan tenaga sukarela.

Pada Tahun 2015, pejabat-pejabat eselon lingkup BAPPEDA adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5. Data Pejabat Eselon Lingkup BAPPEDA Tahun 2015

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Drs.H.M. Ridwan Nur,M si	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas
2.	Drs.H Faisal Sahing, M Si	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris
3.	Hj.Herningsi Latief, SE,M.adm.Pemb	Penata, III/c	Kasubag. Umum & Kepegawaian
4.	Hj. St. Rosliah, B.Sc	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Keuangan
5.	H. Abd Basir, S. Sos	Penata Tk.I, III/d	Kasubag. Program
6.	Bulu Mangung, S. Sos,M.Si	Pembina Tk.I/Ivb	Kabid.Ekonomi
7.	Dra.Kartini,M. Si	Pembina /Iva	Kasubid Pertanian,

			Perikanan & Kelautan
8.	Rifani, S. IP	Penata/IIIc	Kasubid Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan & Energi Sumberdaya Mineral
9.	Drs.Rahmansyah Lantara, M.Si	Pembina/Iva	Kabid. Litbang
10.	Muh. Sukri,S.Sos.M.AP	Penata/IIIc	Kasubid Penelitian & Pengembangan
11.	H.M.Nasir Rahman, S.Sos,MM	Penata Tk.I/IIId	Kabid Sosbud
12.	Irmawati Irwan, S.STP,M.Si	Penata Tk.I/IIId	Kasubid Pendidkn, Kebudayaan,Pemer intahan & Hukum
13.	Nurikhasan Nurdin, SE	Penata/ IIIc	Kasubid sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kepariwisataaan
14.	Drs. Syaiful Bachri	Pembina Tk.I/Ivb	Kabid Fispra
15.	Hajrah Lalla, SP. MP	Pembina/Iva	Kabid SDA, Sarana
16.	Ansar B, S.IP. M AP	Penata/IIIc	Kasubid Tata Ruang

Sumber : Kantor BAPPEDA Kabupaten Takalar

Kondisi umum sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar cukup potensial untuk mengembangkan tugas dan fungsi organisasi. Hanya saja untuk mengantisipasi dan menunjang perencanaan nasional dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan masih perlu di tingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut terutama melalui diklat teknis dan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Sarana dan prasarana

Perlengkapan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten takalar yang dimiliki saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6 Daftar Inventarisasi Sarana dan Prasarana dalam lingkup Bappeda Kabupaten Takalar Tahun 2015.

No	Nama Barang	Keadaan per 31 Desember 2015	
		jumlah	Harga (ribuan)
1.	Tanah		839,724,000.00
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3938m2	779,724,000.00
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	60m2	60,000,000.00
	Alat-alat angkutan		
	Alat-alat kantor dan rumah tangga		
	Alat studio dan komunikasi		

Alat laboratorium

2.	Bangunan gedung		614,288,545.00
	Bangunan Gedung Kantor	160 m2; 1 unit	376,449,845.00
	Permanen		
	- Bangunan Gedung Kantor	30 m2; 1 unit	28,470,000.00
	Permanen		
	- Bangunan Gedung Kantor	56 m2; 1 unit	75,321,700.00
	Permanen		
	- Bangunan tempat ibadah	16 m2;1 unit	15,184,000.00
	Permanen		
	- Pagar	30 m2; 1 unit	25,800,000.00
	- Rumah Negara Gol II Type	60 m2; 1 unit	83,063,000.00
	A Permanen		
	- Paving Blok		10,000,000.00

Sumber : Kantor Bappeda Kabupaten Takalar

5. Visi dan Misi

Bappeda Kabupaten Takalar sebagai institusi dalam perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Bappeda karena perencanaan merupakan faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, dan mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Berkaitan dengan hal

tersebut maka visi BAPPEDA Kabupaten Takalar Tahun 2013 - 2018 adalah
” **Terwujudnya Lembaga Perencana Yang Aspiratif, Koordinatif dan Partisipatif Menuju Pelayanan Masyarakat Takalar Terdepan “**

Visi tersebut diatas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Bappeda Kabupaten Takalar sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah yang :

- a. **Aspiratif** ; dimana aspirasi, ide masukan oleh semua stakeholders disalurkan di dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. **Koordinatif** ; sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Takalar yang mengkoordinasikan perencanaan sifatnya bottom up dan top down.
- c. **Partisipatif** ; dari semua stakeholders terlibat secara langsung dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bappeda maka dirumuskan Misi, Misi Bappeda kabupaten Takalar mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk maupun jasa apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda maka dirumuskan misi Bappeda kabupaten Takalar sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat perencanaan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri seperti dalam visi diperlukan aparat perencanaan yang memiliki kompetensi yang tinggi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat

membawa organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

- b. Meningkatkan koordinasi perencanaan dengan instansi dan lembaga lainnya dengan melalui pengembangan pola kerja yang sinergi dan berwawasan ke depan

Pembangunan administrasi publik difokuskan pada pola koordinasi dengan instansi jawatan/dinas dan lembaga lainnya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis serta berkeadilan dan membangun kompetensi aparat perencana memerlukan suatu pola kerja yang sinergis pada setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi jabatan sehingga selalu berubah ke arah yang lebih baik bersamaan dengan berkembangnya kebutuhan dan perubahan lingkungan yang strategis.

- c. Meningkatkan kualitas Perencanaan melalui pendekatan Teknokratis, Partisipatif, Politis, Bottom-up dan Topdown

Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang integratif, dimana proses perencanaan dilakukan dengan pendekatan teknokratis, Politis, Partisipatif, Bottom Up dan Top Down. Dengan pendekatan ini diharapkan mutu, legitimasi, kepemilikan terhadap dokumen perencanaan dapat tercapai.

6. Tujuan dan Sasaran Tahun 2013 - 2018

- a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- 2) Meningkatnya sistem pendataan/informasi/data statistik.
- 3) Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang terampil dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas.

b. Sasaran :

- 1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif.
- 2) Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date.
- 3) Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dan professional.
- 4) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melindungi lahan pertanian produktif Agar tidak Beralih fungsi

BAPPEDA memiliki peran yang penting dalam melindungi lahan pertanian sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Sukri mengatakan bahwa :

“BAPPEDA memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi lahan pertanian karena BAPPEDA merupakan Badan yang merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sehingga dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan, BAPPEDA akan melakukan penelitian mengenai tingkat produktifitas lahan. BAPPEDA dalam memilih lahan perumahan harus memperhatikan tingkat produktifitas lahan sehingga tidak menimbulkan alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat”.²⁶

Selanjutnya, Rahmansyah Lantara mengemukakan bahwa :

“BAPPEDA harus melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pembinaan tersebut akan memberikan arahan mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pembangunan tersebut, seperti terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan produksifitas di bidang pertanian”.²⁷

Adapun yang dikemukakan oleh Hajrah Lalla mengatakan bahwa :

“BAPPEDA harus menggunakan fungsinya sebagai fungsi pengawasan terhadap alih fungsi lahan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Takalar sehingga apabila ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi”.²⁸

Sedangkan, Bulu' Mangung menyatakan bahwa :

“salah satu peran BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian adalah melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti dalam program pengendalian kegiatan pembangunan perumahan agar tidak mengganggu kawasan pertanian yang produktif, maka penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan wajib memenuhi proses perizinan dan pertimbangan teknis yang diberikan oleh instansi terkait. Produk perizinan tersebut antara lain: Advice plan dari Bappeda, Izin Lokasi dan IMB dari BPPT, *Site Plan* (Ijin Tapak) dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup dan beberapa pertimbangan teknis lainnya yang menjadi persyaratan.

²⁶ Wawancara Muhammad Sukri Kasubid penelitian dan pengembangan

²⁷ Wawancara Rahmansyah Lantara Tanggal 22 Februari 2016

²⁸ Wawancara hajrah lalla, tanggal 22 Februari 2016

Selain itu, Hasniati mengatakan bahwa :

“BAPPEDA harus melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang dan wilayah kabupaten Takalar, sehingga lahan- lahan pertanian yang produktif tidak terganggu karena ada evaluasi yang dilakukan. Selain itu, jika terdapat hal yang tidak sesuai dalam pembangunan dengan Peraturan yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas”.²⁹

BAPPEDA memiliki peran yang penting dalam melindungi lahan pertanian. Adapun hal yang dilakukan BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian yaitu melakukan penelitian terhadap tingkat produktifitas lahan pertanian sehingga dapat merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan. Lahan pertanian yang memiliki tingkat produktifitas yang tinggi tidak akan dilakukan pembangunan pada lahan tersebut. Akan tetapi, lahan yang kurang produktif atau lahan tidur maka pada lahan tersebut yang akan dilakukan pembangunan. Hal ini sangat berguna bagi kelangsungan produksi di sektor pertanian. Selain itu, dalam melindungi lahan pertanian produktif BAPPEDA melakukan pengawasan terhadap lahan pertanian. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mempertahankan lahan pertanian yang produktif sebagai sumber penghasilan masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor utama dan mata pencaharian masyarakat Kabupaten Takalar. BAPPEDA dalam menjalankan fungsinya, membutuhkan kerjasama dengan Instansi lain. Koordinasi BAPPEDA dengan instansi lain akan sangat membantu BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian produktif. Misalnya, dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian,

²⁹ Wawancara hasinati tanggal 22 Februari 2016

maka BAPPEDA akan membutuhkan bantuan dari instansi lain seperti penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan wajib memenuhi proses perizinan dan pertimbangan teknis yang diberikan oleh instansi terkait. Kemudian, BAPPEDA dalam melindungi lahan pertanian akan melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Sehingga, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan rencana yang telah diatur dalam PERDA No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar, maka akan diberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PERDA No 6 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara maka faktor-faktor pendukung untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian adalah:

1) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi)

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Faisal Sahing, bahwa :

“Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk membuat peraturan dan mengurus daerahnya

sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya termasuk dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah”.³⁰

Selain itu, Hajrah Lalla’ pun mengemukakan hal yang sama bahwa :

“Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurus daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak merencanakan pembangunan pada daerahnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dari pemerintah pusat. Sehingga, dengan adanya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah di bawah pengawsasan dari pemerintah pusat akan melaksanakan tanggung jawab tersebut”.³¹

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk dalam hal perencanaan pembangunan daerah. PERDA No 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten takalar merupakan wujud adanya otonomi daerah sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Otonomi daerah sangat membantu pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan yang sangat luas. Pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk mengurus daerahnya termasuk dalam bidang perencanaan pembangunan.

2) Adanya dukungan dari lembaga lain

³⁰ Wawancara Faisal Sahing, tanggal 14 Februari 2016

³¹ Wawancara hajra Lalla’, tanggal 22 Februari 2016

Pembangunan administrasi publik difokuskan pada pola koordinasi dengan instansi jawatan/dinas dan lembaga lainnya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis serta berkeadilan. Bulu' Mangung menyatakan bahwa :

“Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan koordinasi dengan lembaga lain misalnya dalam menangani masalah alih fungsi lahan pertanian, maka BAPPEDA harus bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Badan Pertanian untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan”³²

Kemudian, Rahmansyah Lantara mengatakan bahwa :

“Apabila BAPPEDA bekerjasama dengan lembaga lain dalam menangani alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar, maka perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan mengenai kawasan pertanian dalam Perda Tata Ruang akan berjalan dengan optimal. Sehingga, kerjasama yang baik akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap optimalnya Perda Rencana Tata Ruang”.³³

BAPPEDA dalam menjalankan fungsinya seharusnya mendapatkan dukungan dari instansi lain seperti dinas tata ruang, dinas pertanian, pekerjaan umum, kehutanan dan lingkungan hidup sehingga BAPPEDA akan lebih mudah dalam menjalankan fungsinya. BAPPEDA bersama dengan lembaga-lembaga lain harus bekerjasama dalam mengoptimalkan perencanaan di Kabupaten Takalar sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Apabila BAPPEDA mendapatkan dukungan dari lembaga lain, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar akan

³² Wawancara Bulu' Mangung, tanggal 14 Februari 2016

³³ Wawancara Rahmansyah Lantara, tanggal 22 Februari 2016

berjalan secara optimal sehingga alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar dapat diminimalisir.

3) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah perencanaan dan pembangunan. Menurut Faisal Sahing, :

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan. Misalnya dalam pengalihan fungsi lahan untuk keperluan pembangunan perumahan, sarana dan prasarana, masyarakat harus menyampaikan pendapatnya melalui BPD (Badan Perwakilan Desa) apabila hal tersebut bisa mengganggu tingkat produksi di sektor pertanian.”³⁴

Nuryana pun mengemukakan hal yang sama yaitu :

“peran masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lahan pertanian yang akan dialihfungsikan memang harus dilibatkan karena sebagian besar masyarakat bermatapencaharian di sektor pertanian sehingga kontribusi masyarakat sangat diperlukan”.³⁵

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahli Daeng Sikki, anggota BPD Desa Parangmata mengatakan bahwa :

“Masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Takalar. Aspirasi masyarakat tersebut akan ditampung dan disampaikan oleh BPD kepada badan koordinasi pemanfaatan ruang kabupaten takalar melalui rapat kerja badan koordinasi tersebut.”³⁶

³⁴ Wawancara. Faisal Sahing, tanggal 14 Februari 2016

³⁵ Wawancara Nuryana, tanggal 22 Februari 2016

³⁶ Wawancara dengan Dahli Daeng Sikki' tanggal 26 Maret 2016

Nurafni pun mengatakan hal yang sama, bahwa:

“Partisipasi masyarakat sangat dapat disampaikan kepada BPD sebagai badan penyelenggara pemerintahan desa. Fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, BPD akan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada badan koordinasi pemanfaatan ruang. Sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan.”³⁷

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat membantu optimalnya implementasi Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar. Partisipasi masyarakat misalnya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada BPD (Badan Perwakilan Desa). Selanjutnya aspirasi tersebut akan disampaikan oleh BPD kepada badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Takalar Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi menentukan arah pembangunan daerah.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara maka faktor-faktor pendukung untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Takalar dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian adalah:

(2) Masih terdapat ego dari beberapa instansi

Di dalam pemerintahan daerah, harus terjalin kerjasama yang baik dari semua instansi sehingga tercapai tujuan dalam pemerintahan daerah tersebut. Faisal Sahing mengatakan bahwa :

³⁷ Wawancara dengan Nurafni tanggal 26 Maret 2016

“Saat ini, masih terdapat ego dari beberapa instansi dalam perencanaan pembangunan. Karena masing-masing instansi mengejar target yang telah ditentukan. Misalnya, ketika Dinas pertanian ingin membuka lahan baru untuk meningkatkan produktifitas pertanian, maka Dinas kehutanan tetap mempertahankan area hutan tersebut karena untuk menjaga kelestarian hutan”.³⁸

Bulu’ Mangung mengatakan bahwa :

“Apabila instansi pemerintah tidak bisa bekerjasama satu sama lain dan hanya mementingkan ego sektoralnya, maka tujuan yang ingin dicapai di daerah tersebut tidak akan tercapai. Untuk itu, semua instansi harus bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula halnya dalam mengatasi alih fungsi lahan di Kabupaten Takalar. Semua instansi pemerintah harus saling bekerjasama sehingga Perda rencana tata ruang dapat berjalan secara optimal”.³⁹

Suatu instansi/lembaga memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila terjalin kerjasama, baik internal maupun eksternal. Kerjasama eksternal dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi lain. Akan tetapi, tingginya ego dari beberapa instansi untuk mencapai tujuan instansinya membuat kerjasama tersebut tidak berjalan optimal. Untuk itu, BAPPEDA dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan kesejahteraan bersama. Bukan hanya tujuan BAPPEDA yang tercapai. Akan tetapi tujuan dari instansi lain pun harus diperhatikan karena BAPPEDA dan instansi lain merupakan satu bagian dari pemerintahan Kabupaten Takalar. Sebaliknya, lembaga lain pun

³⁸ Wawancara Faisal Sahing, 14 Februari 2016

³⁹ Wawancara Bulu’ Mangung, tanggal 14 Februari 2016

harus memperhatikan tujuan dari BAPPEDA sebagai badan perencana. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih tingginya ego dari beberapa instansi dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, terkait tentang perencanaan di kawasan pertanian.

(3) Bisnis perumahan semakin berkembang

Sebagai kawasan strategis, tentunya memberikan peluang kepada para bisnis perumahan untuk mengembangkan usahanya.

Dalam hal ini, Hajrah Lalla mengatakan bahwa:

“kawasan srategis akan memberikan peluang yang besar bagi para bisnis perumahan untuk mengembangkan usahanya. Seperti di kawasan Galesong yang merupakan kecamatan yang paling dekat dengan kota makassar, pembangunan perumahan dan ruko (rumah toko) semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi jumlah lahan pertanian yang ada di Galesong. Selain itu, pengembangan perumahan di kawasan Galesong juga merupakan dampak dari perencanaan pembangunan pelabuhan Boddia sebagai pelabuhan Penampung”.⁴⁰

Muhammad Sukri mengatakan bahwa :

“Salah satu kawasan strategis di Kabupaten Takalar adalah kawasan galesong yang terdiri dari kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Selatan. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang paling dekat dengan kota Makassar dengan akses jalan yang cukup bagus yaitu melalui jalan Metro Tanjung Bunga. Sebagai dampaknya, kawasan Galesong mengalami perkembangan yang cukup cepat terutama dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana serta perumahan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para penegmbang bisnis perumahan sebagai uasaha yang cukup menjanjikan”.⁴¹

⁴⁰ Wawancara Hajra Lalla, tanggal 22 Februari 2016

⁴¹ Wawancara Muhammad Sukri, tanggal 22 Februari 2016

Kawasan strategis merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Di Kabupaten Takalar, berdasarkan Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Takalar telah ditetapkan yaitu sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong.

Apabila kawasan strategis tersebut dimanfaatkan oleh para pengembang bisnis perumahan, maka kawasan tersebut akan mengalami penurunan produksi di sektor pertanian dan hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Takalar.

(4) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya

Suatu peraturan akan terlaksana secara optimal apabila semua unsur berfungsi dengan baik sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Nuryana mengatakan bahwa :

“Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan dalam pembangunan mengakibatkan sebagian masyarakat menjual lahan pertanian demi keuntungannya sendiri tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga lahan pertanian tersebut dikembangkan oleh para bisnis perumahan. Hal

tersebut mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan luas lahan pertanian akan semakin berkurang. Selain itu, masyarakat memanfaatkan ruang yang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang”.⁴²

Hal yang sama pun dikemukakan oleh Bulu’ Mangung bahwa:

“Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah akan mudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya, masyarakat akan mengalihfungsikan lahannya sendiri tanpa melalui izin dari pemerintah karena menganggap hal tersebut tidak perlu dan hanya membuang waktu sehingga alih fungsi lahan pun terjadi tanpa izin dari pemerintah meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai izin mendirikan bangunan yang dipajang di area jalan lokasi pertanian”.⁴³

Masyarakat sangat menentukan optimal atau tidaknya suatu peraturan. Apabila kesadaran masyarakat tentang hukum kurang, maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BAPPEDA, salah satu faktor yang menyebabkan PERDA No 6 Tahun 2012 tidak terlaksana secara optimal adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah yaitu mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik

⁴² Wawancara Nuryana, tanggal 22 Februari 2016

⁴³ Wawancara Bulu’ Mangung, tanggal 14 Februari 2016

umum. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemanfaatan ruang. Misalnya, masyarakat masyarakat melakukan alih fungsi lahan tanpa melalui izin dari pemerintah.

3. Upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan Implementasi Perda No 6 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian

Berdasarkan hasil wawancara, maka adapun upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Takalar dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan pertanian adalah :

a. Melakukan Sosialisasi

Sosialisai adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang sekitarnya.

Muhammad Sukri mengatakan bahwa :

”Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalisasikan implementasi Perda No 6 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Takalar adalah dengan melakukan sosialisasi di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Takalar agar pemerintah setempat dan masyarakat mengetahui fungsi lahan di tiap kecamatan sehingga akan mengurangi terjadinya alih fungsi lahan. Hal tersebut telah dilakukan oleh Bappeda pada tahun 2013 setelah diberlakukannya Perda Tata Ruang wilayah”. Untuk itu, dalam melakukan sosialisasi, BAPPEDA harus bekerjasama pula dengan pemerintah Desa sebagai

pemerintah yang lebih mengetahui tentang perubahan fungsi lahan di masyarakat.”⁴⁴

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nuryana bahwa:

“Sosialisasi tentang fungsi lahan tiap kecamatan di Kabupaten Takalar sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang fungsi lahan di daerahnya. Sehingga, upaya tersebut akan memberikan pengaruh terhadap optimalnya peraturan daerah terkait tentang masalah alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar. Untuk itu, sosialisasi tentang fungsi lahan harus lebih dioptimalkan agar lahan pertanian produktif di Kabupaten Takalar tidak mengalami alih fungsi yang mengakibatkan hilangnya lahan pertanian”.⁴⁵

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah mengadakan sosialisasi tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Takalar tentang fungsi lahan di Kecamatan tersebut. Dalam melakukan sosialisai, Bappeda bekerjasama dengan pemerintah Desa sebagai pemerintah yang lebih mengetahui perubahan lahan pertanian yang terjadi di daerahnya. Sosialisasi tentang penggunaan lahan telah dilakukan oleh BAPPEDA pada tahun 2013 setelah PERDA tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan. Adapun hasil kenyataan di lapangan bahwa tidak semua masyarakat Kabupaten Takalar mengetahui fungsi lahan sehingga hal ini dianggap kurang berhasil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan PERDA Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

⁴⁴ Wawancara Muhammad Sukri, tanggal 22 Februari 2016

⁴⁵ Wawancara Nuryana tanggal 22 Februari 2016

b. Melakukan pengawasan

Dalam mengoptimalkan implementasi Perda No 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Takalar, maka diperlukan pengawasan terhadap optimalnya peraturan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Bulu' Mangung mengatakan bahwa :

“BAPPEDA harus melakukan pengawasan terhadap Perda RTRW Kabupaten Takalar sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah untuk membantu pemerintah dalam menangani alih fungsi lahan.”⁴⁶

Kemudian, Hasniati mengatakan bahwa :

“Pengawasan tentang perubahan fungsi lahan harus dilakukan oleh BAPPEDA. Pengawasan tersebut antara lain pengawasan terhadap izin perubahan lahan. Apabila, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten Takalar, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap optimalnya Peraturan Daerah. Sehingga dengan adanya pengawasan, maka baik masyarakat maupun para pengembang bisnis perumahan akan berhati-hati dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian”.⁴⁷

Upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian semaksimal mungkin telah dilakukan. Dari hasil wawancara bahwa salah satu upaya pemerintah saat ini dengan membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah untuk menyelenggarakan kerjasama antar sektor/ antar daerah sehingga pengawasan pengalihan fungsi lahan pertanian berjalan optimal. Analisis peneliti bahwa dalam upaya

⁴⁶ Wawancara Bulu' Mangung, tanggal 14 Februari 2016

⁴⁷ Wawancara Hasniati, tanggal 22 Februari 2016

Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Perda Tata Ruang Wilayah terkait dengan alih fungsi lahan telah diusahakan semaksimal mungkin. Namun masih perlu ditingkatkan kinerja pemerintah dalam perlindungan lahan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas di sektor pertanian dan hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat Kabupaten Takalar.

c. Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang

Pengenaan disinsentif dalam pemanfaat ruang akan sangat berguna dalam mengoptimalkan peraturan daerah tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar. Hasniati mengatakan bahwa :

“Pengenaan disinsentif dalam pemanfaat ruang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Sehingga lahan pertanian yang produktif akan tetap terjaga. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan Perda tentang Rencana tata ruang wilayah karena pihak pengembang atau masyarakat tidak bisa mengganggu lahan tersebut”.⁴⁸

Faisal Sahing mengatakan bahwa :

“Pengenaan disinsentif memberikan peluang bagi pemerintah untuk tetap melindungi lahan pertanian produktif. Pemengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang sangat berguna dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian produktif karena apabila kawasan yang dibatasi pengembangannya tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat atau pun pihak pengembang bisnis perumahan, maka akan diberikan sanksi yang tegas karena telah melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar”.⁴⁹

⁴⁸ Wawancara Hasniati tanggal 22 Februari 2016

⁴⁹ Wawancara Faisal Sahing, tanggal 14 Februari 2016

Pengenaan disinsentif dalam pemanfaat ruang akan sangat berguna dalam mengoptimalkan peraturan daerah tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar. Hal tersebut sesuai dengan pasal 53 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar bahwa Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang berupa pengenaan kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten takalar, kewajiban mendapatkan imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dan persyaratan khusus dalam perizinan. Pengenaan disinsentif sangat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga masyarakat atau pihak pengembang bisnis perumahan akan lebih berhati-hati dalam mengalihfungsikan lahan pertanian.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring.
2. Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.
3. paya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan

sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) peneanaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.

B. Saran

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran penting dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi, sehingga diharapkan kedepannya BAPPEDA dapat lebih mengoptimalkan perannya sehingga alih fungsi lahan pertanian dapat diminimalisir di Kabupaten Takalar.
2. Masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan bantuan pengawasan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2015. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, Syamsyahrir. 2012. *Perubahan lahan pertanian di Kabupaten Takalar tahun 1996 dan 2010 menggunakan citra satelit landsat 5 TM*. Makassar:Fakultas pertanian Universitas Hasanuddin.
- Hasni.2008. *Hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali pers
- Mosher, A.T. 1968. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian:Syarat-syarat mutlak pembangunan dan modernisasi*. Jakarta: Yasaguna.
- Ritohardoyo. 2002. *Penggunaan dan tata guna lahan*.Yogyakarta: Fakultas geografi UGM.
- Salim,agus. 2015. *Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dari tahun 2000-2014*. Makassar:Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar
- Salindeho, john. 1987. *Masalah tanah dalam pembangunan*. Jakarta:Sinar grafika.

Santoso, Urip. 2005. *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai kepastian hukum hak milik atas tanah*. Jakarta: Republika.

Undang-undang

UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perda No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Takalar

Internet

<http://www.google.co.id/makalah> badan usaha di akses pada tanggal 3 januari 2016

<http://www.google.co.id/makalah> pengertian tata guna lahan di akses pada tanggal 3 januari 2016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alamat: Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar Telp. (0411) 855105

USULAN JUDUL SKRIPSI

A. IDENTITAS

Nama : NURLIAH
No Induk Mahasiswa : 1261542017
Program Studi : PPKn/S1

B. JUDUL SKRIPSI YANG DITUSILKAN

1. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN DI KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus : Pasar tradisional Galepong dan Indomaret Poros Galepong Kota)
2. ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Di Kecamatan Galepong)
3. PENGARUH GAME ONLINE TERHADAP PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Galepong Selatan).

Makassar, 14 Agustus 2015

Diketahui Oleh:

Penasihat Akademik


Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum
Nip: 1967/231 199303 1 016

Mahasiswa Yang Bersangkutan


NURLIAH
NIM: 1261542017

Mengetahui
Ketua Jurusan PPKn

Dr. Mustari, M. Hum
Nip: 1965/231 19901015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alamat: Kampus UNM Gunung Sari Barru Makassar Telp. (0411) 885105

PENULISAN SKRIPSI

A. IDENTITAS

Nama : NURILAH
No Induk Mahasiswa : 1261542017
Program Studi : PPKn/S1

B. JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN
TAKALAR 2012-2031 (Studi Tentang Aib Fungsi Laban Pertanian
Menjadi Perumahan Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Takalar)"

C. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

No	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1.	<u>Prof. Dr. Hasanawati Haris, M.Hum</u> Nip: 19671231 199303 1 016	
2.	<u>Lukman Ikhana, S.Pd, M. Pd</u> Nip: 19710703 200701 1 001	

Makassar, 12 Januari 2016

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan PPKn

Dr. Musnari M. Hum
NIP. 19651231 199303 1 015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Alamat : Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar Telp. (0411) 885105

**JUDUL : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH
KABUPATEN TAKALAR 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi
Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Pada Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)"**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa PPKn yang bernama :

Nama : Nurlin
No Induk Mahasiswa : 1261542017
Jurusan : PPKn
Fakultas : Ilmu Sosial

Setelah diperiksa dan diteliti, maka telah layak untuk diajukan dalam seminar proposal.

Makassar, 12 Januari 2016

Ditandatangani Oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. Musnawi Haris, M.Hum
Nip: 196712311993031016

Pembimbing II

Lukman Huda, S.Pd, M. Pd
Nip: 197107052007011001

Mengetahui

Ketua Jurusan PPKn

Dr. Mustari, M.Hum
Nip: 1965123119901015



JURUSAN PENDIDIKAN PENCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Alamat : Jalan Raya Pendidikan Kampus UNM Gunung Sero Baru Makassar

Surat : 1195/UN.36.6.1/KM/2015
Maksud : 1 Rangkap Proposal Penelitian
Hal : Undangan

Yth. Bapak/Ibu Prof. Dr. HASNAWI HARIS, M. Hum

Di Makassar

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar
Proposal

mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi atas nama :

Mahasiswa	: NURLIAH
Nim	: 1261542017
Jurusan/Prodi	: PPKn/SI
Pembimbing I	: Prof. Dr. HASNAWI HARIS, M. Hum
Pembimbing II	: LUKMAN ILHAM, S.Pd, M.Pd
Moderator	: Dr. MUSTARI, M. Hum
Penguji I	: Prof. Dr. HERI TAHIR, M. Hum
Penguji II	: Drs. MUH. AKBAL, M. Hum
Judul	: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN TAKALAR 2012-2031 (Studi tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)"

Seminar tersebut akan dilaksanakan Insya Allah pada :

Hari / Tanggal	: Selasa, 19 Januari 2016
Waktu	: 09:00- selesai
Tempat	: Gedung Flamboyan BE 101(Ruang seminar Jurusan PPKn)

Demikian penyampaian kami atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan

sempat hadir.

Makassar, 14 Januari 2016
Ketua Jurusan PPKn

Dr. Mustari, M. Hum

NIP. 195123110000000000

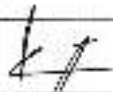



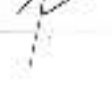
TANDA TERIMA PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL/SEMINAR HASIL/ UJIAN SKRIPSI

Sudah terima naskah proposal/hasil/skripsi atas nama :

Nama : NUZULIAH
 Nim : 1261542017

Dalam rangka seminar proposal/ujian skripsi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 1 April 2016 ~~Sabtu, 19 Januari 2015~~
 Waktu : 09.00 - selesai
 Tempat : Ruang Seminar Jurusan PPKa

No	Nama Dosen	Tanggal Terima	Pernyataan Persetujuan		TTD
			Bersedia Hadir	Tidak Bersedia Hadir (Waktu Yang Diusulkan)	
1	Prof. Dr. Harnawi Harnisjah		✓		
2	Lukmanul Hakim, S.Pd, M.Pd		✓		
3	Dr. Mustari, M. Hum		✓		
4	Prof. Dr. H. Hori Tahar, S.H, M.H		✓		
5	Dr. Muhammad Akbar, M. Hum		✓		

Catatan :

1. Dosen berhak menyatakan keberatan hadir dalam seminar jika proposal diterima kurang 4 (empat) hari dari tanggal pelaksanaan seminar.
2. Apabila tidak bersedia hadir, mohon dicantumkan 3 (waktu) yang diusulkan pada kolom yang telah disediakan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : FIS UNM@unm.ac.id

Nomor : 0590/UN36.6/PI/2016

29 Januari 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan
Penelitian

Yth. : GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Cq. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini,
dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka penulisan skripsi.

Nama : Nurliah

Stambok : 1261542017

Jurusan/Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Hasnawi Harris, M.Hum.

2. Lukman Ilham, S.Pd., M.Pd.

Masalah yang diteliti :

Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

196308121988031002 Bidang Akademik,
NIP 196308121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan PPKn

UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

250/S.01.P/P2T/02/2016

Kepada Yth.
Bupati Takalar

izin Penelitian

di-
Tempat

Surat Dekan Fak. Ilmu Sosial UNM Makassar Nomor : 0488/UN36.8/PL/2016 tanggal 29 Januari
tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURLIAH
No. : 1261542017
Pendidikan : Pend. Pkn
Lampiran : Mahasiswa(S1)
Jl. AP. Pettarani Makassar

Untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan

MENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN
KABUPATEN TAKALAR 2012-2013 (STUDI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Februari s/d 08 Maret 2016

dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 04 Februari 2016

Go. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPADA RUMAH KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAHIN, SE, MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Di Saksi : J. H. V. Makassar,

Makassar

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://n2tikam.sulselprov.go.id> Email : p2t_govsul@yahoo.com
Makassar 69000

Takalar, 09 Februari 2016

Revisi : 030666KKHP-IV 2016
Tempat :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Kab. Takalar
di
Temboi

Menindak lanjuti Surat Kepala BKPMID Prov. Sulawesi Selatan Nomor : 259/S/BPPT/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NURLIAH
Tempat/Tanggal Lahir : Tembolong, 26 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Msh. Fak Ilmu Sosial UINM Makassar
Alamat : Tembolong Desa Parangpota Kec. Gabung Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Kantor / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH KABUPATEN TAKALAR 2012-2031 (STUDI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR)"

Yang akan dilaksanakan : 09 Februari s.d 08 Maret 2016
Pengantar / Peserta :

Selubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dilaporkan kepada yang bersangkutan sesuai melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mematuhi semua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat ;
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar Foto Copy hasil Skripsi kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan Penelitian ini diambil kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk disetujui dan sepepetnya.



Sehubungan : disampaikan kepada Yth :
Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
Gp. Ka. Badan Kesbang Prop. Sulsel di Makassar ;
Bupati Takalar (sebagai laporan) ;
Anggota Forkopinda Kab. Takalar di Takalar ;
Dekan Fak Ilmu Sosial UINM Makassar di Makassar ;
Sdr. () NURLIAH di Temboi ;

Takalar, 7 Maret 2016

Nomor : 050/043/II/2016

Tempat : -

Isi : Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Makassar

di -

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dengan Nomor: 070/60/KKBP-II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Izin Penelitian, maka kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama **NURLIAH, NIM: 1261542017** mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNM Makassar telah mengadakan penelitian pada **Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Takalar**.

Demikianlah penyampaian kami, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Bappeda



Drs. H. Kasim Sahing, M.Si

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19680110 199101 1 002

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Drs. H. Faisal Sahing, M.Si
Umur : 48 tahun
Jabatan : Sekretaris Bappeda
Pendidikan : S2
2. Nama : Bulu' Mangung, S.Sos, M.Si
Umur : 53 tahun
Jabatan : Kabid Ekonomi
Pendidikan : S2
3. Nama : Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si
Umur : 46 tahun
Jabatan : Kabid Litbang
Pendidikan : S2
4. Nama : Muhammad Sukri, S.Sos, M.AP
Umur : 42 tahun
Jabatan : Kasubid Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan : S2
5. Nama : Hajra Lalla, S.P, M.P
Umur : 44 tahun
Jabatan : Kabid SDA, Sarana
Pendidikan : S2
6. Nama : Nuryana, S.Sos
Umur : 38 tahun
Jabatan : Staf Bappeda
Pendidikan : S1
7. Nama : Hasniati, S.P
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Staf Bappeda
Pendidikan : S1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini digunakan dalam rangka pengambilan data untuk penelitian penyusunan skripsi oleh Nurliah, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan jawaban dengan sejujur-jujurnya dan kondisi yang sebenar benarnya. Pemberian jawaban yang jujur dan objektif sangat membantu keberhasilan penelitian ini Terimah banyak atas perhatiannya.

I. Tanggal Wawancara :

II. Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Umur :
3. Pendidikan terakhir :
4. Jabatan :

Wawancara untuk pegawai Bappeda

1. Bagaimana BAPPEDA Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar ?
2. Apakah BAPPEDA membutuhkan koordinasi dengan instansi lain dalam penyusunan perencanaan pembangunan terkait alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana bentuk pembinaan BAPPEDA dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ?
4. Bagaimana bentuk pengawasan dan pengendalian BAPPEDA dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkhusus mengenai alih fungsi lahan pertanian?
5. Bagaimana evaluasi dan monitoring BAPPEDA dalam pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan terkhusus mengenai alih fungsi lahan pertanian?

6. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan Perda tata ruang wilayah Kabupaten Takalar ?
7. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Perda tata ruang wilayah Kabupaten Takalar?



Alih fungsi lahan pertanian menjadi Perumahan zam-zam di Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.



Alih fungsi lahan pertanian menjadi Ruko (rumah toko) di Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.



Wawancara dengan Drs. H. Faisal Sahing, M.Si, sekretaris Bappeda Kabupaten Takalar.



Wawancara dengan Bulu' Mangong, S.Sos, M.Si, Ketua Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Takalar.



Wawancara dengan Nuryana, S.Sos, staf Bappeda Kabupaten Takalar.



Wawancara dengan Muhammad Sukri, S.Sos, M.AP, Kasubid Penelitian dan pengembangan Bappeda Kab. Takalar.



Wawancara dengan Hajrah Lalla, S.P, M.P, Kabid SDA, Sarana dan Hasniati, SE, Staf Bappeda Kabupaten Takalar.



Wawancara dengan Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Takalar.



BUPATI TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2012-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di kabupaten Taklar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu disusun rencana tata ruang wilayah.
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektorf, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha.

- c. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan kedua.
- 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 4. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 9lembaran negara republik indonesia tahun 2004 no 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

- daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
5. Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan pemerintah no 6 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 48, tambahan lembaran neagar republik indonesia nomor 4833);
 9. Peraturan pemerintah no 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 21, ta,bahan lembaran negara republik indonesia nomor 5103);
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar);
 11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAKALAR

Dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAKALAR TAHUN 2012-2031**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Kepala daerah adalah bupati takalar.
3. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten takalar.
4. Pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi sulawesi selatan.
5. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penegndalian pemanfaatan ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wialayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya utama.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam , sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
21. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk peneglolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
25. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
26. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
27. Badan koordinasi penataan ruang daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di kabupaten takalar dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten Takalar bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Mamminasata dan pusat sinergi pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Takalar terdiri atas :

1. Pengembangan sektor ekonomi primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
2. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
3. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya;
4. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
6. Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 4

(1) Strategi sektoral pengembangan primer, sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai dengan keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terdiri atas :

- a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan kelautan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan lahan;
- b. memanfaatkan lahan non produktif menjadi produktif dan bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

- (2) Strategi peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (3) Strategi penguatan dan pemulihan kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) terdiri atas :
- a. memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, pemulihan fungsi hutan produksi dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan budidaya, hutan lindung, suaka alam dan cagar alam laut.
- (4) Strategi pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) terdiri atas :
- a. mengembangkan energi terbarukan sebagai sumber pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga uap (batubara), surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat; dan

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*).
- (5) Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) terdiri atas :
- a. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman dan kawasan; dan
 - c. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (6) Strategi Pengembangan kawasan budidaya kelautan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) terdiri atas :
- a. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
 - b. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir.
- (7) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset Pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Takalar meliputi :
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya
- (2) rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya berdasarkan rencana sistem pusat permukiman Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
- (2) Pusat kegiatan di kawasan perkotaan sekitarnya di Kawasan Perkotaan Takalar, Kabupaten Takalar, terdiri atas:
 - a. pusat pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 - d. pusat pelayanan olah raga;
 - e. pusat pelayanan kesehatan;
 - f. pusat kegiatan industri manufaktur;
 - g. pusat kegiatan industri perikanan;
 - h. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - i. pusat kegiatan transportasi laut regional;
 - j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - k. pusat kegiatan pariwisata; dan
 - l. pusat kegiatan pertanian

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang terdapat dalam album peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan;
- (4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) rencana pengembangan jalan Trans Sulawesi ruas Maros-Makassar-Sungguminasa-Takalar; dan
 - 2) rencana pengembangan jalan Lingkar Luar dan/atau By pass Mamminasata.
 - b. jaringan jalan arteri sekunder yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi: Rencana pengembangan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Sungguminasa dengan Kawasan Perkotaan Takalar;
 - c. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) ruas Jl. Batas Kab. Gowa-Batas Kota Takalar sepanjang 5,975 Km;
 - 2) ruas Jl. Diponegoro sepanjang 1,436 Km;
 - 3) ruas Jl. Sudirman sepanjang 2,265 Km;
 - 4) ruas Batas Kota Takalar-Batas Kota Jenepono sepanjang 45,786 Km; dan
 - 5) ruas Jl. A. Yani sepanjang 1,821 Km.
 - d. jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Takalar meliputi:
 - 1) ruas Batas Kota Makassar – Bonto Ramba sepanjang 22,45Km;
 - 2) ruas Bonto Nempo Selatan – Pattalassang sepanjang 8,15 Km; dan
 - 3) ruas Panciro – Galesong – Pattalassang sepanjang 39,30 Km.
 - e. jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan lokal yang merupakan sistem jaringan jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Takalar, terdiri atas:
 - 1) jalan kolektor primer (K4); dan
 - 2) jalan lokal primer.
 - f. jaringan jalan kolektor primer dan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada huruf e dijelaskan dalam dokumen materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - g. rencana pengembangan jaringan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal yang meliputi:
 - 1) terminal penumpang yang terdiri atas:
 - a) terminal penumpang tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan yaitu Terminal Pattalassang di Kecamatan Pattalassang; dan
 - b) rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kawasan Agropolitan Mallolo yang diintegrasikan dengan terminal barang.
 - 2) terminal barang yang terdiri atas:
 - a) terminal Pattalassang di Kecamatan Pattalassang; dan
 - b) terminal di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Polombangkeng Utara.
- b. jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trayek angkutan penumpang dan angkutan barang yang terdiri atas:
 - 1) trayek angkutan barang;
 - 2) trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
 - 3) trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - 4) trayek angkutan penumpang perdesaan.
- c. trayek angkutan barang dan angkutan penumpang, sebagaimana dimaksud pada huruf b dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di kabupaten Takalar dikembangkan untuk kegiatan pariwisata di Pulau Tanakeke dan Pulau Sanrobengi;
- (2) Sistem jaringan transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan yang merupakan simpul transportasi penyeberangan adalah Pelabuhan Boddia di Kecamatan Galesong; dan
- (3) Penyelenggaraan transportasi sungai dan penyeberangan sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan perkeretapaian di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dalam rangka mewujudkan jaringan jalur kereta api nasional;
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota yang meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan Parepare – Makassar – Takalar – Bulukumba – Watampone – Parepare;
 - b. jaringan jalur kereta api, yang menghubungkan pusat kegiatan kawasan perkotaan dengan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
 - c. jaringan jalur kereta api dari kawasan industri Takalar dengan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain; dan
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industri perkapalan, dan pangkalan angkatan laut (LANAL) beserta zona penyangganya:
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Galesong di Kecamatan Galesong;

- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran regional yang menghubungkan Pelabuhan Galesong dan pelabuhan pengumpan lainnya; dan
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energy;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang terdapat dalam album peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang dilayani oleh terminal subpusat distribusi di Kabupaten Gowa;
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri atas:
 - 1) rencana pembangunan PLTU Punaga 4 x 100 MW terdapat di Kecamatan Mangarabombang; dan
 - 2) rencana pembangunan PLTU Lakatong 3 x 20 MW terdapat di Kecamatan Mangarabombang.

- b. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Takalar terdiri atas:
 - 1) pembangunan PLTD Talasa II terdapat di Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan kapasitas 90 MW; dan
 - 2) pembangunan PLTD Talasa III terdapat di Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan kapasitas 40 MW.
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro;
- (4) jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. saluran Udara Tegangan Tinggi kapasitas 150 KV yang menghubungkan GI Sungguminasa dengan GI Takalar, dan menghubungkan GI Jeneponto dengan GI Tallasa; dan
 - b. sebaran Gardu Induk (GI) yang meliputi GI Tallasa dengan kapasitas 20 MVA terdapat di Kecamatan Pattalassang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan teresterial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Takalar di Kecamatan Pattalassang

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sumber air; dan
 - b. Prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Wilayah sungai strategis nasional;
 - b. Sumber air permukaan; dan
 - c. Bendungan.
- (3) Wilayah sungai strategis nasional yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Wilayah Sungai Jeneberang yang meliputi DAS Pamukkulu dan DAS Gamanti;
- (4) Sumber air permukaan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. air permukaan berupa sungai, yang terdiri dari Sungai Pamukkulu, Sungai Gamanti, dan anak sungai lainnya;
 - b. air permukaan lainnya yang terdiri dari:
 - 1) embung yang terdiri dari: Embung Bonto Kadatto 1 dan Embung Bonto Kadatto 2 di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Embung Cikoang, Embung Laikang 1, Embung Laikang 2, Embung Laikang 3, Embung Malelaya 1 dan Embung Malelaya 2 di Kecamatan Marabombang, Embung Lassang di Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
 - 2) mata air yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.
- (5) Bendungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu Bendungan Pamukkulu di Kecamatan Polombangkeng Utara, Bendungan Kampili Bissua di Kecamatan Polombangkeng Utara, Bendungan Jenemarrung di Kecamatan Polombangkeng Selatan, Bendungan Jenetallasa di Kecamatan Polombangkeng Utara dan bendungan Jenemaeja di Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. daerah irigasi;
 - b. sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.

- (7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat adalah DI Pamukkulu dengan luas 5.204 (lima ribu dua ratus empat) hektar dan DI Bissua dengan luas 10.758 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi adalah DI Jenemarrung dengan luas 1.052 (seribu lima puluh dua) hektar; dan
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 11 DI meliputi total luas 2.852 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua) hektar.
- (8) Rincian DI sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tercantum dalam Lampiran II. 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (9) Sistem jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b, terdiri dari:
- a. IPA Pattalassang di Kecamatan Pattalassang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik.
 - b. IPA Galesong di Kecamatan Galesong dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
 - c. IPA Sanrobone di Kecamatan Sanrobone dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
 - d. IPA Polombangkeng Utara di Kecamatan Polombangkeng Utara dengan kapasitas terpasang 15 (lima belas) Liter/Detik, dan kapasitas 12,5 (dua belas koma lima) Liter/Detik.
 - e. IPA Mangarabombang di Kecamatan Mangarabombang dengan kapasitas terpasang 20 (dua puluh) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 17,5 (tujuh belas koma lima) Liter/Detik.
- (10) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan melalui pengendalian terhadap luapan air Sungai Pappa dan Sungai Gamanti untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan di Kabupaten Takalar.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Sistem pengelolaan persampahan;
- b. Sistem penyediaan air minum;
- c. Sistem jaringan air limbah;

- d. Sistem jaringan drainase; dan
- e. Jalur evakuasi bencana;

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
- (3) Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah terdiri atas TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan perkotaan;
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Kawasan Perkotaan Takalar Kecamatan Pattalassang;
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Balang Kecamatan Polombangkeng Selatan.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Pappa dan Sungai Gamanti;
 - b. unit produksi air minum meliputi: IPA Pattalassang di Kecamatan Pattalassang dengan kapasitas terpasang 35 (tiga puluh lima) Liter/Detik, dan kapasitas produksi 30 (tiga puluh) Liter/Detik.; dan
 - c. unit distribusi yang menyalurkan air minum melalui pipa distribusi langsung ke rumah-rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (3) Sistem jaringan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat;
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah Galesong yang melayani Kawasan Industri Takalar dan kawasan permukiman Galesong;
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga; dan
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan pariwisata;
- (2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti; dan

- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terdiri atas :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam;
- f. Kawasan lindung geologi; dan
- g. Kawasan lindung lainnya;

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dengan luasan kurang lebih 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di bagian hulu DAS Pappa Kecamatan Polombangkeng Utara dan bagian hulu DAS Gamanti Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Galesong Utara,

Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan Mangarabombang, dengan ketentuan:

- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Sungai Pappa, dan Sungai Gamanti dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Bendungan Kampili Bissua, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Je'nemarrung, Bendungan Je'netallasa, dan Bendungan Je'nemaeja dengan ketentuan:
- a. daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
- (5) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Takalar.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 27

- (1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka margasatwa; dan
 - b. Kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luasan kurang lebih 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) hektar; dan
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang dengan luasan kurang lebih 6 (Enam) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 28

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Sanrobone, dan sebagian Kecamatan Mappakasunggu; dan
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Polombangkeng Selatan, dan Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan tsunami; dan
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air.
- (2) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, dan sebagian Kecamatan Galesong Utara;
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan ketentuan:
- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 30

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, terdiri atas:
- a. Taman buru; dan
 - b. Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas zona buru, zona pemanfaatan, zona pengembangan satwa, dan zona lainnya untuk kegiatan yang dapat menunjang kegiatan perlindungan dan rehabilitasi kawasan;
- (3) Kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Taman Buru Ko'mara berada di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luasan kurang lebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar;
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan; dan
- (5) Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di:
- a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi Pulau Tanakeke di Kecamatan Mappakasunggu dan Pulau Sanrobenge di Kecamatan Galesong;

- b. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
- c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang di kawasan pesisir Mappakasunggu dan Mangarabombang; dan
- d. kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Galesong Kecamatan Galesong .

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 31

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi dengan luasan kurang lebih 2.961 (dua ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan pola hutan tanaman rakyat.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 18.688 (delapan belas ribu enam ratus delapan ratus delapan puluh delapan) hektar; dan
 - b. Kawasan peruntukan pertanian lahan kering ditetapkan di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 8.800 (delapan ribu delapan ratus) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Mangarabombang dan sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 4.554 (empat ribu lima ratus lima puluh empat) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan dengan luasan kurang lebih 4.815 (empat ribu delapan ratus lima belas) hektar, terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kapok ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan tebu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;

- c. kawasan peruntukan perkebunan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian kecamatan Sanrobone sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara; dan
 - e. kawasan peruntukan perkebunan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian Kecamatan Galesong Utara dengan luasan kurang lebih 2.808 (dua ribu delapan ratus delapan) hektar.
- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 18.688 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Laut Flores dan wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan

Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, dan sebagian Kecamatan Galesong

- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air laut dan budidaya perikanan air tawar dengan luasan kurang lebih 4.914 (empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar terdiri dari:
- a. Kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan.
 - b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan ikan bandeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara; dan
 - c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Sanrobone, sebagian Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kawasan Pengolahan Ikan Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Mangarabombang dengan pusat pengolahan di Kecamatan Galesong.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 35

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
- b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas :
 - a. wilayah usaha pertambangan; dan
 - b. wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. wilayah usaha pertambangan mineral logam komoditas tambang pasir besi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, dan sebagian Kecamatan Sanrobone.
 - b. wilayah usaha pertambangan mineral batuan meliputi: komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (3) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Pasal 37

Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertambangan minyak Blok Karaengta yang berada di wilayah perairan laut Selat Makassar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri besar;

- b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Takalar Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Polombangkeng Utara yang merupakan pusat kegiatan industri manufaktur , dengan luasan kurang lebih 100 (seratus) hektar;
 - (3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kawasan pengembangan agroindustri dan minaindustri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;
 - (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan industri rumah tangga sebagai penunjang kegiatan industri besar, penunjang kegiatan industri sedang dan penunjang kegiatan pariwisata ditetapkan di sebagian Kecamatan Pattalassang, sebagian Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan wisata budaya dan religi, ditetapkan di:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara untuk kegiatan pesta Assosso pa'rasanganta di Bonto Lebang;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Galesong untuk kegiatan pesta nelayan Boddia;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan untuk kegiatan pesta Lammang di Lantang;

- d. sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu untuk kegiatan pesta Akkio Bunting, pesta Angngaru, pusta Qur'an Barakka, dan pesta Je'ne Sappara; dan
 - e. sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang untuk kegiatan pesta Maudu Lompoa di Cikoang.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan wisata pantai, dan laut serta wisata pegunungan ditetapkan di:
- a. Pantai Lamankia, Pantai Puntondo, dan Pantai Punaga di Kecamatan Mangarabombang;
 - b. Pantai Galumbaya, Pantai Paria Laut, Pulau Dayang-dayangan, dan Pulau Tanakeke di Kecamatan Sanrobone
 - c. Pantai Gusunga di Kecamatan Galesong Utara;
 - d. Pantai Boe, dan Pulau Sanrobenge di Kecamatan Galesong ;
 - e. Pantai Gusunga di Kecamatan Galesong Utara;
 - f. Gunung Buakkang di Kecamatan Polombangkeng Selatan; dan
 - g. Taman buru Ko'mara, Suaka Margasatwa Ko'mara dan Barugaya di Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan pariwisata buatan yang akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;

- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara;
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, dan sebagian wilayah Galesong Utara.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, terdiri atas;
 - a. Kawasan peruntukan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten;
 - b. Kawasan peruntukan pusat perdagangan dan jasa regional;
 - c. Kawasan peruntukan pusat pendidikan tinggi;
 - d. Kawasan peruntukan pusat pelayanan olahraga;
 - e. Kawasan peruntukan pusat pelayanan kesehatan; dan
 - f. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pusat kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang;
- (3) Kawasan peruntukan pusat perdagangan dan jasa regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
- (4) Kawasan peruntukan pusat pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang; Sebagian wilayah Kecamatan Galesong

- (5) Kawasan peruntukan pusat pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang;
- (6) Kawasan peruntukan pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Galesong, dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara; dan
- (7) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan di sebagian wilayah Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten Takalar merupakan bagian wilayah Kabupaten Takalar yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
- (2) Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Takalar meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan strategis nasional di wilayah Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a adalah Kawasan Strategis

Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi Kawasan Perkotaan Mamminasata yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Takalar;

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
 - c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan lahan pangan berkelanjutan ditetapkan pada di sebagian Kecamatan Polombangkeng Utara, sebagian Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian Kecamatan Mappakasunggu, sebagian Kecamatan Mangarabombang, dan sebagian Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kopi robusta dan kakao ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan, sebagian wilayah Polombangkeng Utara,
 - c. kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan,
 - d. kawasan industri skala besar ditetapkan di Kawasan Industri Takalar di Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Polombangkeng Utara.
- (3) KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Kawasan Penambangan Minyak Blok Karaengta ditetapkan di wilayah perairan Selat Makassar Kabupaten Takalar;
- (4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone, sebagian wilayah Kecamatan Galesong dan sebagian wilayah Kecamatan Galesong Utara;
 - b. kawasan lindung provinsi berupa kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan dan kawasan

rawan bencana alam Gunung Bawakaraeng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan.

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- (2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan:
 - a. kawasan pusat kegiatan industry perikanan di sebagian wilayah Kecamatan Galesong;
 - b. kawasan pusat perkotaan di Kecamatan Pattalassang dan Kecamatan Galesong;
 - c. Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Agropolitan Malolo di Kecamatan Polombangkeng Utara;
 - d. Kawasan Industri Takalar di Kecamatan galesong utara dan Kecamatan Polombangkeng Utara;
 - e. Kawasan pendidikan maritim Galesong di Kecamatan Galesong;
 - f. Kawasan PPI Beba' di Kecamatan Galesong Utara;
 - g. Kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya perikanan di sebagian Kecamatan Galesong Utara, sebagian wilayah Kecamatan Galesong Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Sanrobone dan sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang;
 - h. Kawasan Minapolitan Sanrobone dan sekitarnya
 - i. Kawasan pelabuhan dan pergudangan Galesong di Kecamatan Galesong; dan
 - j. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Punaga dan sekitarnya di Kecamatan Mangarabombang.
- (3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan:
 - a. Kawasan mangrove di sebagian Kecamatan Mangarabombang;
 - b. Kawasan Pantai Topejawa di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang; dan

- c. Kawasan konservasi dan pariwisata gugusan Pulau Tanakeke di sebagian wilayah Kecamatan Mappakasunggu dan Teluk Laikang di sebagian wilayah Kecamatan Mangarabombang.
- (4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan kawasan Penambangan Minyak Blok Karaengta di wilayah perairan Selat Makassar; dan
- (5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan:
 - a. Kawasan Suaka Margastwa dan taman buru Ko'mara di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara; dan
 - b. Kawasan hutan lindung di sebagian wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 46

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar;
- (2) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat

maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten Takalar, yang meliputi:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2012-2016;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2017-2021;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2022-2026; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2027-2031.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II. 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Pasal 47

- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar;
- (4) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut pada lampiran II. 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 49

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 50

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan perangkat pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Takalar diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemberian insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pusat kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya;
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Kabupaten Takalar;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
- a. Pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pemerintah daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat

Pasal 53

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pusat kegiatan di kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya;
- (2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Pengurangan retribusi;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. Kemudahan perizinan.
- (3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:

- a. Pengenaan kompensasi;
- b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar;
- c. Kewajiban mendapatkan imbalan;
- d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. Persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 54

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal .47 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif;
- (3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 56

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 57

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mengkordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan, organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah.
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. Mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang;

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah meliputi :

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan; dan
- c. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 63 dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan

kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 65

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada tahap perencanaan tata ruang berupa :

- a. masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) mengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah dan kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 70

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 71

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 72

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Takalar yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Takalar dan Album Peta skala 1: 50.000;
- (2) Buku RTRW Kabupaten Takalar dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Untuk operasionalisasi RTRWK Takalar, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 76

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
 - a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila terjadi perubahan rencana kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 29 Februari 2012

BUPATI TAKALAR

Dr. H. Ibrahim Rewa, MM

Diundangkan di Takalar,

Pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Ir. H.A.M Jen Syarif Rifai, M. Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 6

Lampiran II. 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAKALAR TAHUN 2012-2031

TABEL DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN TAKALAR

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (ha)	LOKASI
1.	Jenetallasa	481	Desa Towata, Polombangkeng Utara
2.	Jenemaaja	220	Desa Barugaya, Polombangkeng Utara
3.	Barugaya	214	Desa Barugaya, Polombangkeng Utara
4.	Lembang Loe	200	Desa Barugayya, Polombangkeng Utara
5.	Batang Lappo	325	Desa Bontomanai, Mangarabombang
6.	Kato'nokang	161	Bontokanang, Galesong Selatan
7.	Balang Tanaya	145	Desa Pa'rappunganta, Polut
8.	Bontorea	266	Desa Tarowang, Galesong Selatan

9.	Palilangi	200	Desa Bontolebang, Polombangkeng Selatan
10.	Kampong Bugisi	190	Desa Lantang, Polombangkeng Selatan
11.	Ngai-ngai	45	Desa Bentang, Galesong Selatan

BUPATI TAKALAR,

Dr. Ibrahim Rewa, MM

RIWAYAT HIDUP



NURLIAH, Lahir pada tanggal 26 Oktober 1994 di Tamalalang Desa Parangmata Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Musatafa dan Cawang.

Penulis memulai pendidikan formal di sekolah dasar negeri No 192 Inpres Tamalalang Desa Parangmata Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada tahun 2000 dan tamat tahun 2006. Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Galesong Selatan dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah lanjutan di SMA Negeri 1 Galesong Selatan dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selama kuliah penulis sempat aktif dalam organisasi internal sebagai anggota pengkajian politik hukum dan HAM (2012-2013) Himpunan Jurusan PPKn dan organisasi eksternal Komunitas Laskar Takalar Bersedekah (L- Tabe') sampai saat ini.